



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

2025

LAPORAN KEUANGAN

1 Januari s.d. 31 Desember 2025

UAKPA

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG METRO**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Metro (KPKNL Metro) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Metro mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Metro. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Metro, 04 Mei 2026

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Setiadi
NIP19700415 199603 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	IV
Ringkasan Laporan	1
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	1
III Laporan Operasional	1
IV Laporan Perubahan Ekuitas	2
V Catatan Atas Laporan Keuangan	2
A Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3. Basis Akuntansi	8
A.4. Dasar Pengukuran	8
A.5. Kebijakan Akuntansi	9
B Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	15
B.1. Pendapatan	15
B.2. Belanja	16
B.3. Belanja Pegawai	17
B.4. Belanja Barang	17
B.5. Belanja Modal	18
C. Penjelasan Atas Pos Pos Neraca	19
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	19
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	19
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	20
C.4. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	20
C.5. Pendapatan Yang Masih Harus diterima	20
C.6. Piutang Bukan Pajak	21
C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Bukan Pajak	21
C.8. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	21
C.9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	21
C.10. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	22
C.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	22
C.12. Persediaan	22
C.13. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	23
C.14. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	23
C.15. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	23
C.16. Tanah	23
C.17. Peralatan dan Mesin	24
C.18. Gedung dan Bangunan	24
C.19. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25
C.20. Aset Tetap Lainnya	25
C.21. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	25
C.22. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	25
C.23. Aset Tak Berwujud	25
C.24. Aset Lain-Lain	25
C.25. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	26
C.26. Utang Kepada Pihak Ketiga	26
C.27. Pendapatan Diterima di Muka	26
C.28. Uang Muka dari KPPN	27
C.29. Utang Jangka Pendek Lainnya	27

C.30	Ekuitas	27
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	28
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	28
D.2.	Beban Pegawai	28
D.3.	Beban Persediaan	28
D.4.	Beban Barang dan Jasa	29
D.5.	Beban Pemeliharaan	29
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	29
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	29
D.8.	Beban Bantuan Sosial	30
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	30
D.10.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	30
D.11.	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	30
D.12.	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	31
D.13.	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	31
D.14.	Pos Luar Biasa	31
E	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
E.1.	Ekuitas Awal	31
E.2.	Surplus (Defisit) LO	31
E.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	31
E.3.2	Koreksi Nilai Persediaan	32
E.3.3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	32
E.3.4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	32
E.3.5	Koreksi Lain-lain	32
E.4.	Transaksi Antar Entitas	32
E.4.1	DDEL/DKEL	33
E.4.2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	33
E.5	Ekuitas Akhir	33
F.	Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	33
VI	Lampiran-Lampiran	34

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPKNL Metro yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir s.d. 31 Desember 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Metro, 04 Mei 2026

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Setiadi

NIP19700415 199603 1 002



RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro Tahun 2025 untuk periode yang berakhir s.d. 31 Desember TA 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.838.126.711 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.838.126.711 atau mencapai 163,36 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp1.737.308.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.941.105.042 atau mencapai 91,59 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.211.130.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.642.669.405 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.068.608.369; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp13.574.061.036 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp976.903.447 dan Rp13.665.765.958.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.851.168.351 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.977.619.745 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp -126.451.394, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp17.290.000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-109.161.394.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp13.573.297.364, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-109.161.394 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp201.629.988 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp13.665.765.958.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31
DESEMBER 2024

URAIAN	Ket	TA 2025		% thd Angg	TA 2024 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	1.737.308.000	2.838.126.711	163,36	2.574.738.119
Penerimaan Hibah	B.1.3	-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN		1.737.308.000	2.838.126.711	163,36	2.574.738.119
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	2.677.155.000	2.448.620.042	91,46	1.913.101.165
Belanja Modal	B.2.3	533.975.000	492.485.000	92,23	1.565.508.756
Belanja Hibah	B.2.4	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.5	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		3.211.130.000	2.941.105.042	91,59	3.478.609.921

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	6.291.640	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3.	976.476.447	6.221.178
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	24.040.000	-
Persediaan	C.10	61.800.282	16.423.076
Jumlah Aset Lancar		1.068.608.369	22.644.254
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang			
ASET TETAP			
Tanah	C.14	2.181.751.269	2.181.751.269
Peralatan dan Mesin	C.15	5.842.369.788	5.935.421.825
Gedung dan Bangunan	C.16	12.029.703.487	12.029.703.487
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(6.479.763.508)	(6.577.084.336)
Jumlah Aset Tetap		13.574.061.036	13.569.792.245
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain - Lain	C.22	1.179.990.973	533.998.236
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(1.179.990.973)	(533.998.236)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		14.642.669.405	13.592.436.499
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.25	974.903.447	19.139.135
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.27	2.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		976.903.447	19.139.135
JUMLAH KEWAJIBAN		976.903.447	19.139.135
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	13.665.765.958	13.573.297.364
JUMLAH EKUITAS		13.665.765.958	13.573.297.364
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14.642.669.405	13.592.436.499

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN
31 DESEMBER 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	2.851.168.351	2.490.098.119
JUMLAH PENDAPATAN		2.851.168.351	2.490.098.119
BEBAN			
Beban Pegawai	-	-	-
Beban Persediaan	D.2	56.576.235	86.946.274
Beban Barang dan Jasa	D.3	1.414.266.357	963.959.926
Beban Pemeliharaan	D.4	582.041.482	461.906.207
Beban Perjalanan Dinas	D.5	349.843.762	396.406.654
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	574.891.909	510.708.691
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-
JUMLAH BEBAN		2.977.619.745	2.419.927.752
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(126.451.394)	70.170.367
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.7		
Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar		17.290.000	84.637.000
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		17.290.000	84.637.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(109.161.394)	154.807.367
POS LUAR BIASA	D.8		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(109.161.394)	154.807.367

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN
31 DESEMBER 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	13.573.297.364	12.498.999.445
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(109.161.394)	154.807.367
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	0	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	201.629.988	919.490.552
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		92.468.594	1.074.297.919
EKUITAS AKHIR	E.6	13.665.765.958	13.573.297.364

A. PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPKNL Metro**

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

KPKNL Metro didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam mengelola Barang Milik Negara, pelayan lelang, pelayanan penilaian maupun pengurusan piutang negara. Entitas berkedudukan di Jalan AH. Nasution No. 116 Kota Metro, Lampung.

1) Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Metro

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Metro Periode s.d. Triwulan IV Tahun 2025 adalah 115,77 %, dengan rincian sebagai berikut:

Kode	IKU	Capaian
1a-CP	Indeks Integritas	105,32
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	120
2a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	107,86%
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	120
2c-CP	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	120
3b-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	120
3a-CP	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	120
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	103,85%
4b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	120
5a-CP	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	120
5b-CP	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	120
5c-CP	Persentase Produktivitas Lelang	120
6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	120
6b-N	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	120
6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	120
7a-CP	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	116,82
7b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	120
8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	120
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	116,11
8c-N	Indeks Capaian Unit Kinerja dalam Keberlanjutan Pembanguana ZI-WBK/WBBM	120
NILAI KINERJA ORGANISASI		115,77%

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 untuk periode yang berakhir s.d. 31 Desember TA 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Metro. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada Instansi Pemerintah.

SAKTI terdiri dari modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang, serta modul akuntansi dan pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan, Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

A.3. Basis Akuntansi

KPKNL Metro menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Metro dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 untuk periode yang berakhir s.d. 31 Desember 2025 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPKNL Metro. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Metro adalah sebagai berikut:

Pendapatan
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Bea Lelang.
 - Pendapatan Piutang Negara.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada laporan keuangan. Namun apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,

dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang - undangan di bidang Pengelolaan BMN.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

KUALITAS PIUTANG	URAIAN	PENYISIHAN
------------------	--------	------------

Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp2.838.126.711

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.838.126.711 atau mencapai 163,36 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.737.308.000. Pendapatan KPKNL Metro terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.838.126.711. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan perekonomian sudah semakin pulih sehingga minat masyarakat atas lelang semakin optimal.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp2.838.126.711 dan Rp2.574.738.119. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 10,23% dari TA 2024.

Selain itu, dapat dilihat pada tabel perbandingan realisasi pendapatan dibandingkan periode yang sama pada TA 2024, beberapa jenis pendapatan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember TA 2025 dan Per 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Lainnya	500.000	500.000	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2.603.404.169	2.151.290.374	21,02
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	204.246.500	230.811.026	(11,51)
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	12.686.042	107.465.386	(88,20)
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	17.290.000	83.799.000	(79,37)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	34.333	(100,00)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	838.000	(100,00)
Jumlah	2.838.126.711	2.574.738.119	10,23

*Realisasi Belanja Negara
Rp2.941.105.042*

B.2. Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp2.941.105.042 atau 91,59 % dari anggaran belanja sebesar Rp.3.211.130.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%REALISASI
Belanja Barang	2.677.155.000	2.448.620.042	91,46
Belanja Modal	533.975.000	492.485.000	92,23
Jumlah	3.211.130.000	2.941.105.042	91,59

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.448.620.042	1.913.101.165	27,99
Belanja Modal	492.485.000	1.565.508.756	(68,54)
Jumlah	2.941.105.042	3.478.609.921	(15,45)

Belanja Pegawai Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 untuk periode yang berakhir s.d. 31 Desember 2025 tidak lagi dilaksanakan oleh kantor vertikal, melainkan dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJKN.

Belanja Barang

Rp2.448.620.042

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.448.620.042 dan Rp1.913.101.165. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 27,99% dari Realisasi TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	820.435.607	688.216.866	19,21
Belanja Barang Non Operasional	592.345.750	95.963.811	517,26
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	101.953.441	86.590.090	17,74
Belanja Jasa	2.000.000	184.017.537	(98,91)
Belanja Pemeliharaan	582.041.482	461.906.207	26,01
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	349.843.762	397.006.654	(11,88)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.448.620.042	1.913.701.165	27,95
Pengembalian Belanja	-	600.000	(100,00)
Jumlah Belanja	2.448.620.042	1.913.101.165	27,99

Belanja Modal

Rp492.485.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp492.485.000 dan Rp1.565.508.756. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar

68,54% dibandingkan TA 2024.

Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024:

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	492.485.000	449.424.000	9,58
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	1.116.084.756	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	492.485.000	1.565.508.756	(68,54)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	492.485.000	1.565.508.756	(68,54)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester I TA 2025 dan 2024

Keterangan	TA 2025	TA 2024
Bank BRI : BPG 126 KPKNL METRO	Rp0	Rp0
Uang Tunai di Brankas	Rp0	Rp0
Jumlah	Rp0	Rp0

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp6.291.640

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp6.291.640 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TA 2025	TA 2024
BRI : RPL 126 KPKNL METRO UTK PDJ PIUTANG	Rp0	Rp0
BRI : RPL 126 KPKNL METRO UTK PDJ LELANG	Rp6.291.640	Rp0
Jumlah	Rp6.291.640	Rp0

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp976.476.447

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp976.476.447 dan Rp6.221.178.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TA 2025	TA 2024
Pajak PPh yang belum disetor	Rp2.000.000	Rp0
Dana Pihak Ketiga	Rp974.476.447	Rp1.396.178
Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp0	Rp4.825.000
Jumlah	Rp976.476.447	Rp6.221.178

Belanja Dibayar
Dimuka (prepaid)
Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan Yang
Masih Harus
Diterima
Rp24.040.000

C.5 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp24.040.000 dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya.

Piutang Bukan
Pajak
Rp0

C.6 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang ini berasal dari angsuran bulanan yang akan diterima atas uang muka belanja (prepayment) yang telah diberikan kepada pegawai.

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Bukan
Pajak Rp0

C.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Bagian Lancar TPA
Rp0

C.8 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Penyisihan Piutang
Tidak
Tertagih-Bagian
Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&.

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0

C.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Penyisihan Piutang
Tidak
Tertagih-Bagian
Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)
Rp0

C.11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR.

Persediaan
Rp61.800.282

C.12 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp61.800.282 dan Rp16.423.076. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Persediaan	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	Rp61.800.282	Rp16.423.076
Barang untuk Pemeliharaan	Rp0	Rp0
Suku Cadang	Rp0	Rp0
Persediaan Lainnya	Rp0	Rp0
Jumlah	Rp61.800.282	Rp16.423.076

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tu
ntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0

C.13 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.14 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0

C.15 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp2.181.751.269

C.16 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPKNL Metro per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.181.751.269 dan Rp2.181.751.269.

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai	Ket
1	620 m2	Jl. AH Nasution No 116 Kota Metro (Tanah Bangunan Kantor Pemerintah)	Rp1.260.305.000	
2	139 m2	Jl. Pala Manis III, Kota Metro (Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I)	Rp212.446.269	Pada tahun 2022, KPKNL melaksanakan pembelian Rumah Negara Gol I tipe C senilai Rp601.470.000, dengan rincian nilai tanah sebesar Rp212.446.269 dan nilai bangunan sebesar Rp389.023.731
3	135 m2	Jl. Pala VI Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Pusat	Rp709.000.000	Pada tahun 2023, KPKNL melaksanakan pembelian Rumah

				Negara Gol I tipe D senilai Rp.2.250.000.000, dengan rincian nilai tanah sebesar Rp709.000.000 dan nilai bangunan sebesar Rp1.541.000.000
JUMLAH			Rp2.181.751.269	

Peralatan dan
Mesin
Rp5.842.369.788

C.17 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp5.842.369.788 dan Rp5.935.421.825. Perubahan nilai pada Peralatan dan Mesin dipengaruhi oleh mutasi senilai Rp93.052.037.

Gedung dan
Bangunan
Rp12.029.703.487

C.18 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp12.029.703.487 dan Rp12.029.703.487. Tidak terdapat mutasi tambah dan/atau mutasi kurang karena tidak adanya alokasi anggaran belanja modal gedung dan bangunan.

Rincian Gedung dan Bangunan

Kuantitas	Uraian	Nilai	Ket
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rp10.099.679.756	Pada tahun 2024 terdapat mutasi tambah renovasi gedung kantor permanen dengan nilai sebesar Rp1.116.084.756 dan mutasi kurang dengan nilai Rp0.
1	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Rp389.023.731	Pada tahun 2022, KPKNL melaksanakan pembelian Rumah Negara Gol I tipe C senilai Rp601.470.000, dengan rincian nilai tanah sebesar Rp212.446.269 dan nilai bangunan sebesar Rp389.023.731
5	Rumah Negara Gol I tipe C	Rp1.541.000.000	Pada tahun 2023, KPKNL melaksanakan pembelian Rumah Negara Gol I tipe D senilai Rp.2.250.000.000, dengan rincian nilai tanah sebesar Rp709.000.000 dan nilai bangunan sebesar Rp1.541.000.000
JUMLAH		Rp12.029.703.487	

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0

C.19 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tetap Lainnya
Rp0

C.20 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(6.479.763.508)

C.22 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp(6.479.763.508) dan Rp(6.577.084.336). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.23 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak terdapat aset tak berwujud pada KPKNL Metro sampai dengan berakhirnya periode laporan.

Aset Lain-Lain
Rp1.179.990.973

C.24 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp1.179.990.973 dan Rp533.998.236. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(1.179.990.973)

C.25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp(1.179.990.973) dan Rp(533.998.236). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp974.903.447

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp974.903.447 dan Rp19.139.135. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar (Kode Akun 212112)	Rp427.000	Terdiri dari: Tagihan Biaya Pengiriman Surat/Dokumen Rp427.000
Dana Pihak Ketiga (Kode Akun 212192)	Rp974.476.447	Terdiri dari: 1. Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai Rp125.968.000 2. Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milk Kementerian/Lembaga Rp510.620.000 3. Uang Jaminan Lelang yang belum diambil Rp337.328.447 4. Lain-lain Lelang Rp560.000
JUMLAH	Rp974.903.447	

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Uang Muka dari
KPPN Rp0

C.28 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp2.000.000

C.29 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.000.000 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

No	Uraian	T.A.2025	T.A.2024
1.	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor (Kode Akun 219963)	Rp2.000.000	Rp0
	Total	Rp2.000.000	Rp0

Ekuitas
Rp13.665.765.958

C.30 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.665.765.958 dan Rp13.573.297.364. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp2.851.168.351

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.851.168.351 dan Rp2.490.098.119.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan TA 2024

NO	URAIAN	2025	2024	%
1	Pendapatan Jasa Lainnya	500.000	500.000	-
2	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2.633.735.809	2.151.290.374	22,43
3	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	204.246.500	230.811.026	(11,51)
4	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	12.686.042	107.462.386	(88,19)
5	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	-	-	-
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	34.333	(100,00)
	Jumlah	2.851.168.351	2.490.098.110	14,50

Beban Pegawai
Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Namun berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka mulai TA 2021 belanja pegawai dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJKN.

Beban Persediaan
Rp56.576.235

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp56.576.235 dan Rp86.946.274. Beban

Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp1.414.266.357*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.414.266.357 dan Rp963.959.926. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

*Beban
Pemeliharaan
Rp582.041.482*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp582.041.482 dan Rp461.906.207. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp349.843.762*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp349.843.762 dan Rp396.406.654. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

Beban Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp574.891.909

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp574.891.909 dan Rp510.708.691. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar
Rp17.290.000

D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.290.000 dan Rp84.637.000.

Uraian Jenis Beban	Realisasi T.A. 2025 (Rupiah)	Realisasi T.A. 2024 (Rupiah)	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	17.290.000	83.799.000	(79)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	838.000	(100)
Jumlah	17.290.000	84.637.000	(80)

Surplus (Defisit)
Penyelesaian
Kewajiban Jangka
Panjang Rp0

D.12. Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Pos Luar Biasa Rp0

D.14 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp13.573.297.364

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.13.573.297.364 dan Rp.12.498.999.445.

Surplus LO
Rp.109.161.394

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.109.161.394 dan Rp.154.807.367. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain
Rp0

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp201.629.988

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp201.629.988 dan Rp919.490.552. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(2.838.126.711)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.941.105.042
Transfer Masuk	86.675.700
Transfer Keluar	11.975.957
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	201.629.988

Diterima dari Entitas
lain
Rp(2.838.126.711)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp2.941.105.042, sedangkan DDEL sebesar minus Rp2.838.126.711. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Ditagihkan ke
Entitas lain
Rp2.941.105.042

Transfer Masuk
Rp86.675.700

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp86.675.700, sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp11.975.957.

Transfer Keluar
Rp11.975.957.

Ekuitas Akhir
Rp13.665.765.958

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.13.665.765.958,00 dan Rp.13.573.297.364,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/MK/SJ/2025 tentang Mutasi, Pengangkatan, dan Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan, pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan :

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Ramson Damanik
Pejabat Pembuat Komitmen	: Johan Wahyudi
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Maryanto
Bendahara	: Amelia Rizkyanti

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Wahyu Setiadi
Pejabat Pembuat Komitmen	: Johan Wahyudi
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Maryanto
Bendahara	: Amelia Rizkyanti

LAMPIRAN LAMPIRAN

- A. Laporan Keuangan
 - Lampiran LRA
 - Lampiran Neraca
 - Lampiran LO
 - Lampiran LPE
- B. Bendahara Pengeluaran
 - LPJ Bendahara Pengeluaran
 - BKU Bendahara Pengeluaran
 - Daftar Rekening
 - Laporan Saldo Rekening
- C. Bendahara Penerimaan
 - LPJ Bendahara Penerimaan
 - BKU Bendahara Penerimaan
 - Daftar Rekening Bendahara Penerimaan
 - LPSK (Laporan Posisi Saldo Kas)
- D. Laporan BMN
 - Laporan Posisi BMN di Neraca
 - Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel
 - Laporan Barang Pengguna Ekstrakomptabel
 - Laporan Barang Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
 - Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Laporan Barang Persediaan
- E. Lain-lain
 - Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan TA 2025
 - Formulir Memo Penyesuaian